

# RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009-2015



<https://htt.bps.go.id>





**RINGKASAN  
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TAHUN 2009-2015**



# **RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009-2015**

ISSN : 2528-2131  
Katalog : 4601009.53  
No. Publikasi : 53520.1701  
Ukuran buku : 19,05 cm x 25,40 cm  
Jumlah Halaman : viii + 34 halaman

Naskah :  
Bidang Statistik Sosial

Penyunting :  
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :  
Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :  
© BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dicetak Oleh :  
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial  
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN**  
**RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2009-2015**

**Pengarah :**

Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

**Penanggung Jawab :**

Martin Suanta, SE, M.Si

**Penyunting :**

Alberth Christian Lulan, SST, M.Si

**Penulis :**

Dewi Rara, SST



# KATA PENGANTAR

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dimulai sejak tahun 2007. BPS mulai terlibat langsung sejak penyusunan IDI 2009 dan sekaligus sebagai *benchmark* penyusunan IDI. Oleh karena itu, publikasi ini berupaya menyajikan data IDI sejak 2009 hingga tahun 2015 agar dapat melihat perkembangan IDI sesuai komponen IDI 2009 sekaligus melihat perubahan dua indikator pada tahun 2015 sebagai upaya penyempurnaan penyusunan IDI. Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia dikoordinir oleh Bappenas, didukung oleh UNDP, Kemendagri, BPS dan Bappeda.

Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. Survei-survei yang dilakukan BPS pada umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan rumah tangga atau perusahaan. Pada pengumpulan data IDI dilakukan gabungan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui review surat kabar dan review dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.

Terbitnya buku ini semoga dapat bermanfaat bagi pemerintah provinsi dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Ringkasan IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2015 disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kupang, Januari 2017

Kepala BPS Provinsi NTT



Maritje Pattiwaellapia, SE. M.Si



# DAFTAR ISI

Tim Penyusun.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Apakah IDI itu? .....	1
Perkembangan IDI.....	10
Lampiran.....	28







## Apakah IDI Itu?

- ❑ Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi.
- ❑ IDI telah disusun sejak tahun 2007 dan tahun 2009 baru terbentuk benchmark penyusunan IDI sehingga komponen IDI mengacu pada IDI 2009 yaitu terdiri dari **3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator.**

- ❑ Mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi karena selama ini perkembangan demokrasi hanya diukur secara kualitatif hanya berdasarkan perkiraan yang bersifat subjektif tanpa tolok ukur yang jelas
- ❑ Mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia
- ❑ Pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan pembangunan demokrasi

## TUJUAN

# Komponen IDI

## 3 Aspek, 11 Variabel dan 28 Indikator

### Kebebasan Sipil



- Kebebasan Berkumpul dan Berserikat; 2 indikator
- Kebebasan Berpendapat; 2 indikator
- Kebebasan Berkeyakinan; 3 indikator
- Kebebasan dari Diskriminasi; 3 indikator.

### Hak-hak Politik



- Hak Memilih dan Dipilih; 5 indikator
- Hak Partisipasi Politik: Pengambilan Keputusan dan Pengawasan; 2 indikator

### Lembaga Demokrasi



- Pemilu yang Bebas dan Adil; 2 indikator
- Peran DPRD; 3 indikator
- Peran Partai Politik; 2 indikator
- Peran Birokrasi Pemerintah Daerah; 2 indikator
- Peran Peradilan yang Independen; 2 indikator

## Indikator- Indikator dalam Aspek Kebebasan Sipil

### Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat

1. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
2. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

### Variabel kebebasan berpendapat

3. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
4. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat

### Variabel kebebasan berkeyakinan

5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya
6. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya
7. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama

### Variabel kebebasan dari diskriminasi

8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
9. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya

# Indikator- Indikator dalam Aspek Hak-Hak Politik

## Variabel hak memilih dan dipilih

11. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat
12. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih
13. Kualitas daftar pemilih tetap
14. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)
15. Persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota

## Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

16. Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok
17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah

# Indikator- Indikator dalam Aspek Lembaga Demokrasi

## Variabel Pemilu yang bebas dan adil

18. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

19. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

## Variabel peran DPRD

20. Besaran alokasi anggaran pendidikan

Besaran alokasi anggaran kesehatan

21. Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan

22. Rekomendasi DPRD kepada eksekutif

## Variabel peran parpol

23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu

24. Persentase perempuan dalam kepemimpinan parpol tingkat provinsi

## Variabel peran birokrasi Pemda\*

25. Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon /parpol tertentu dalam pemilu legislatif

## Kebijakan Pejabat Pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN\*

26. Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif

## Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah \*

## Variabel peran peradilan yang independen

27. Keputusan hakim yang kontroversial

28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

**\*Mulai 2015 diterapkan 2 indikator baru sebagai komponen dari variabel "Peran Birokrasi Pemerintah Daerah" mengganti 2 indikator sebelumnya.**

# Metodologi Pengumpulan Data

Rujukan awal berupa data kuantitatif sebagai sumber data utama

Kualitatif; mengkonfirmasi, meluruskan, dan melengkapi hasil review surat kabar dan dokumen

Tahap I  
(Pendekatan kuantitatif )

Review surat kabar dan review dokumen.



Tahap II  
(Pendekatan kualitatif )



Focus Group Discussion (FGD)

Tahap III  
(Pendekatan kualitatif )



Wawancara Mendalam

# Review Surat Kabar dan Dokumen

## 1. Review Surat Kabar

Review surat kabar dilakukan terhadap muatan surat kabar terpilih di ibu kota provinsi. Surat kabar yang terpilih untuk Provinsi NTT adalah SKH Pos Kupang. Tujuan dari review surat kabar adalah untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI. Review surat kabar dilakukan terhadap seluruh edisi SKH Pos Kupang dalam tahun berjalan.

## 2. Review Dokumen

Review dokumen dilakukan terhadap dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD, seperti Perda, Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan DPRD serta dokumen-dokumen resmi lainnya.



# ***Focus Group Discussion (FGD)***

## ***Focus Group Discussion (FGD)***

*Focus Group Discussion (FGD)* adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998:1).



**Tujuan FGD dalam pengumpulan IDI adalah:**

1. Untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui review surat kabar dan review dokumen.
2. Melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI.
3. Menggali informasi berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review surat kabar dan review dokumen.

# WAWANCARA MENDALAM



## Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

- Wawancara mendalam digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* surat kabar dan dokumen serta FGD.
- Dalam proses pengumpulan data, wawancara mendalam bersifat komplementer melengkapi ketiga metode lainnya.
- Wawancara mendalam dilakukan setelah FGD guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Pos terakhir dalam penjarangan data kualitatif dan juga sebagai filter dalam mengurangi bias informasi berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.
- Narasumber wawancara mendalam adalah orang-orang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas terkait indikator IDI. Penentuan narasumber *in-depth interview* ditentukan melalui pengidentifikasian partisipan yang dianggap layak pada FGD.

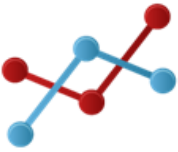
## Tahapan Penghitungan IDI

### Skala Kinerja Demokrasi

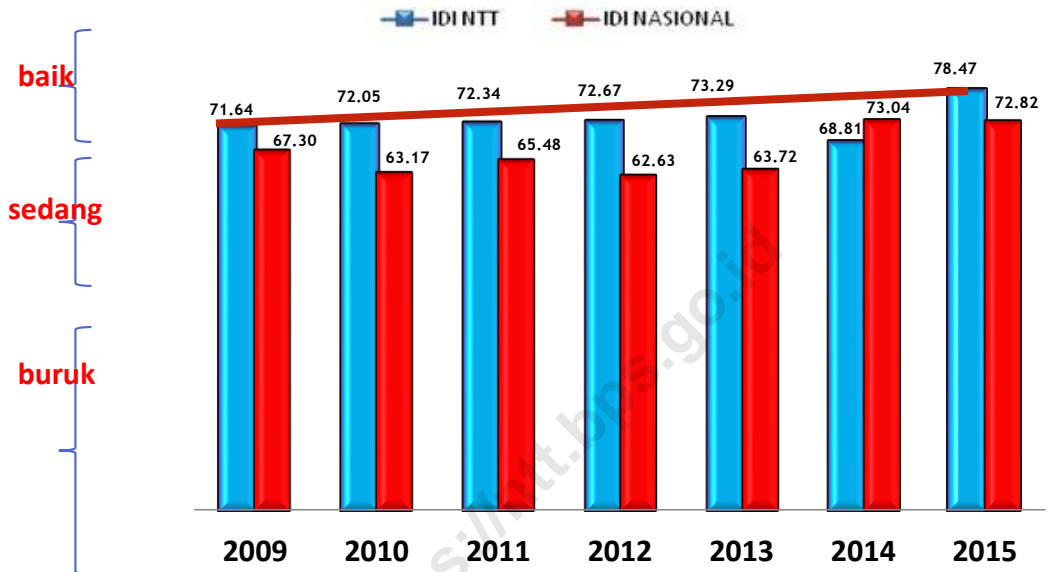
Untuk menggambarkan pencapaian kinerja demokrasi digunakan skala 0-100. Skala tersebut dibagi dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu:

- Baik, lebih besar dari 80
- Sedang antara 60 sampai dengan 80
- Kurang, lebih kecil dari 60



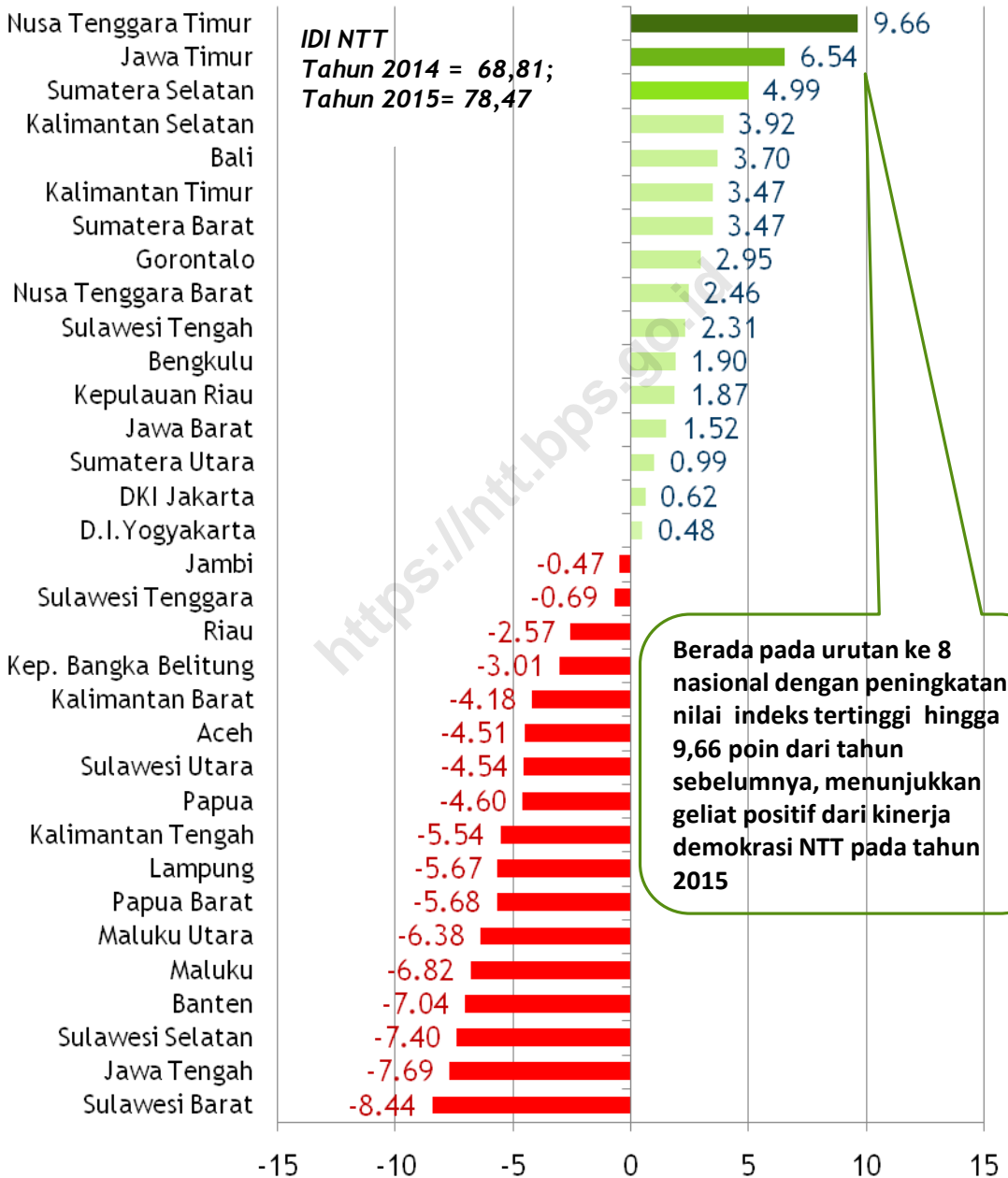


## Perkembangan IDI 2009-2015 Provinsi NTT

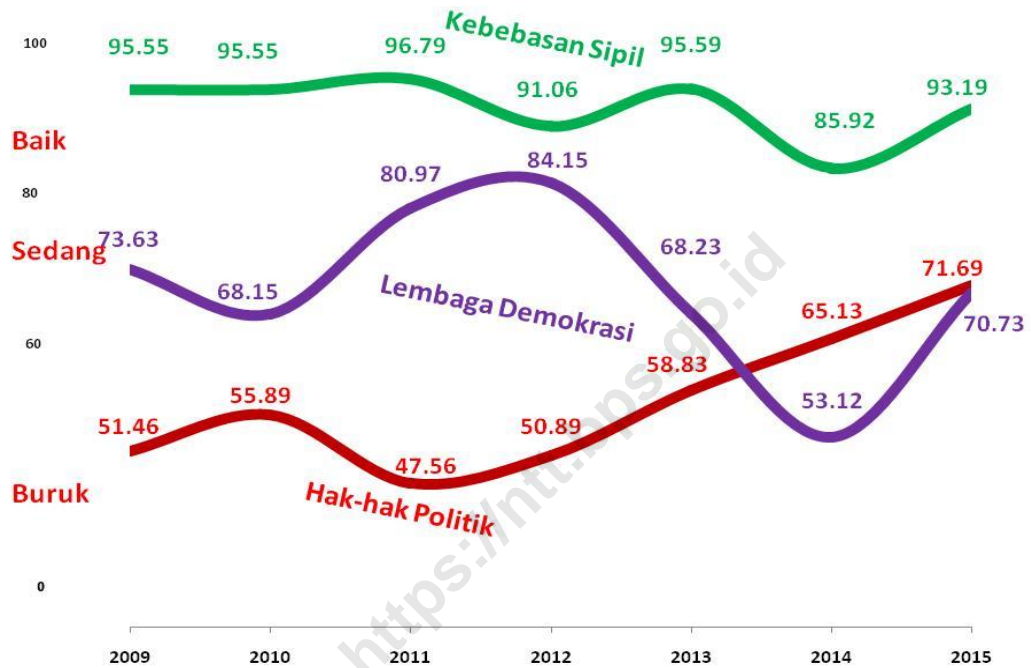


- ✓ Selama periode 2009-2015, angka IDI NTT menunjukkan tren meningkat. Angka IDI NTT 2009 sebesar 71,64 meningkat menjadi 78,47 pada IDI NTT 2015.
- ✓ Selain itu, IDI NTT 2015 merupakan capaian nilai IDI tertinggi selama kurun waktu tersebut.
- ✓ Nilai IDI NTT selalu lebih tinggi dibanding nilai IDI nasional kecuali pada tahun 2014 dimana IDI NTT mengalami penurunan indeks yang tinggi pada waktu itu dan IDI NTT menempati urutan ke – 24 setelah sebelumnya berada pada urutan pertama.

# Capaian Peningkatan Nilai IDI NTT 2014-2015 dan Keterbandingan Nasional



## Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Aspek, IDI NTT 2009 – 2015

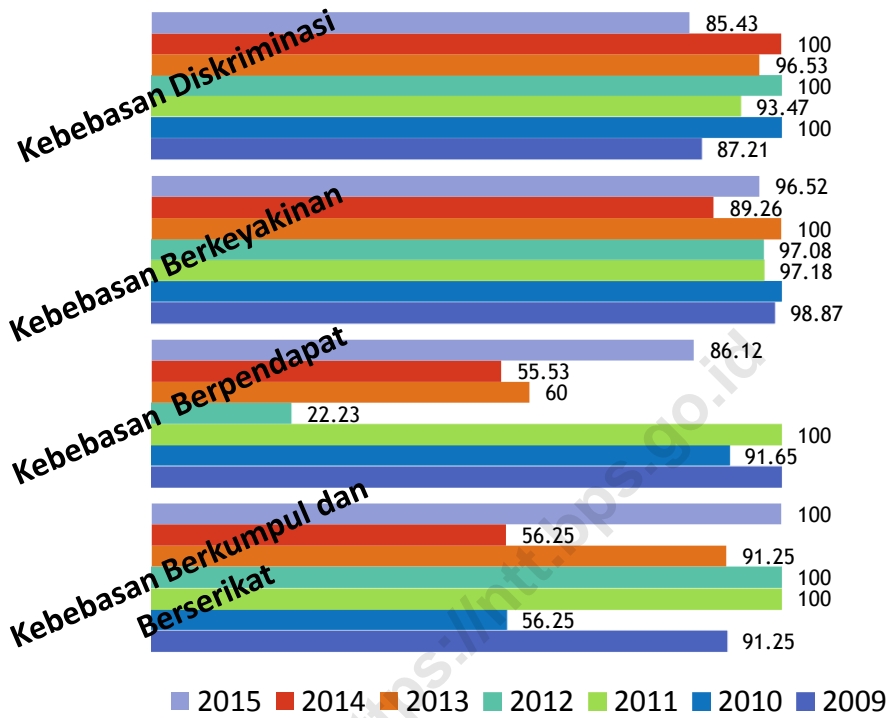


✓ Dari sisi aspek kebebasan sipil, kinerja demokrasi selalu mencapai indeks yang baik dan sedikit berfluktuasi sepanjang tahun 2009-2015.

✓ Aspek Hak-hak politik memberikan kontribusi nilai buruk tahun 2009-2013. Namun geliat kinerja aspek hak-hak politik menunjukkan trend meningkat tahun 2014-2015. Capaian tertinggi dari nilai aspek ini sebesar 71,69 di tahun 2015, masuk dalam kategori sedang.

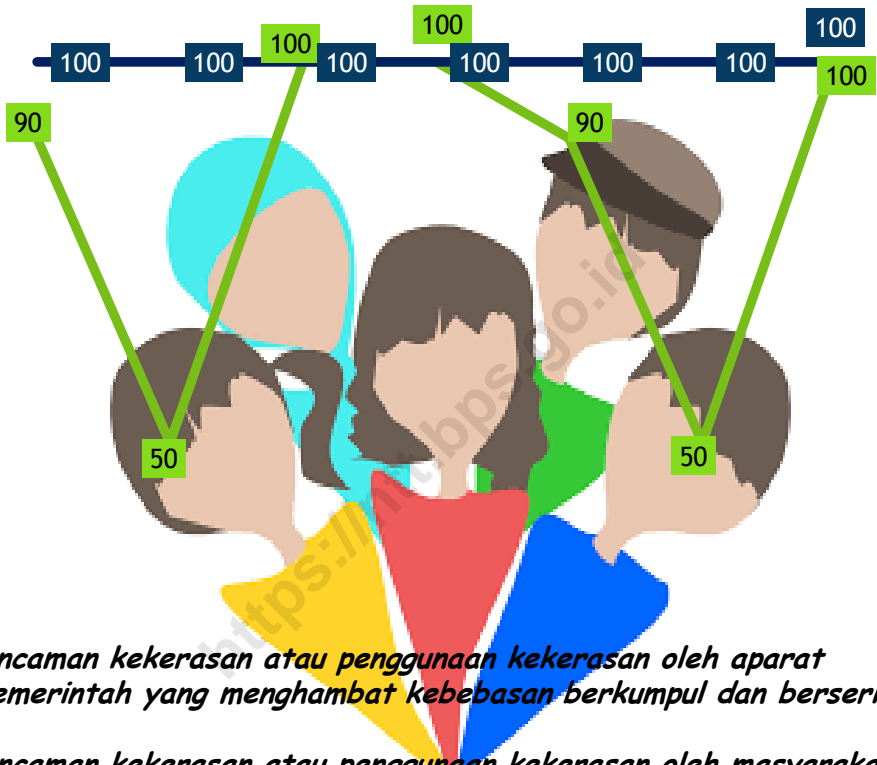
✓ Aspek lembaga demokrasi menunjukkan kinerja demokrasi yang lebih berfluktuasi dibandingkan aspek lainnya. Nilai capaian terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 53,12, masuk kategori buruk dan capaian nilai tertinggi sebesar 84,15, masuk kategori baik.

# Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil, IDI NTT 2009-2015



- ✓ Dalam kurun waktu 2009-2015, variabel kebebasan dari diskriminasi dan variabel kebebasan berkeyakinan selalu dalam capaian nilai yang baik.
- ✓ Pada tahun 2015 dari empat variabel, hanya satu variabel yang menunjukkan penurunan indeks dari tahun sebelumnya, yakni variabel kebebasan dari diskriminasi, turun 14,57 poin. Walaupun demikian, variabel ini selalu mencapai nilai IDI yang baik dalam kurun waktu 2009-2015.
- ✓ Variabel Kebebasan Berpendapat pernah mencapai nilai indeks kategori buruk pada tahun 2012 dan 2014 masing-masing sebesar 55,53 dan 22,23. Begitupun dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, pernah mencapai nilai dalam kategori buruk masing-masing sebesar 56,25 pada tahun 2010 dan 2014.

# Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI NTT 2009 - 2015



Ind 1

*Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat*

Ind 2

*Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat*

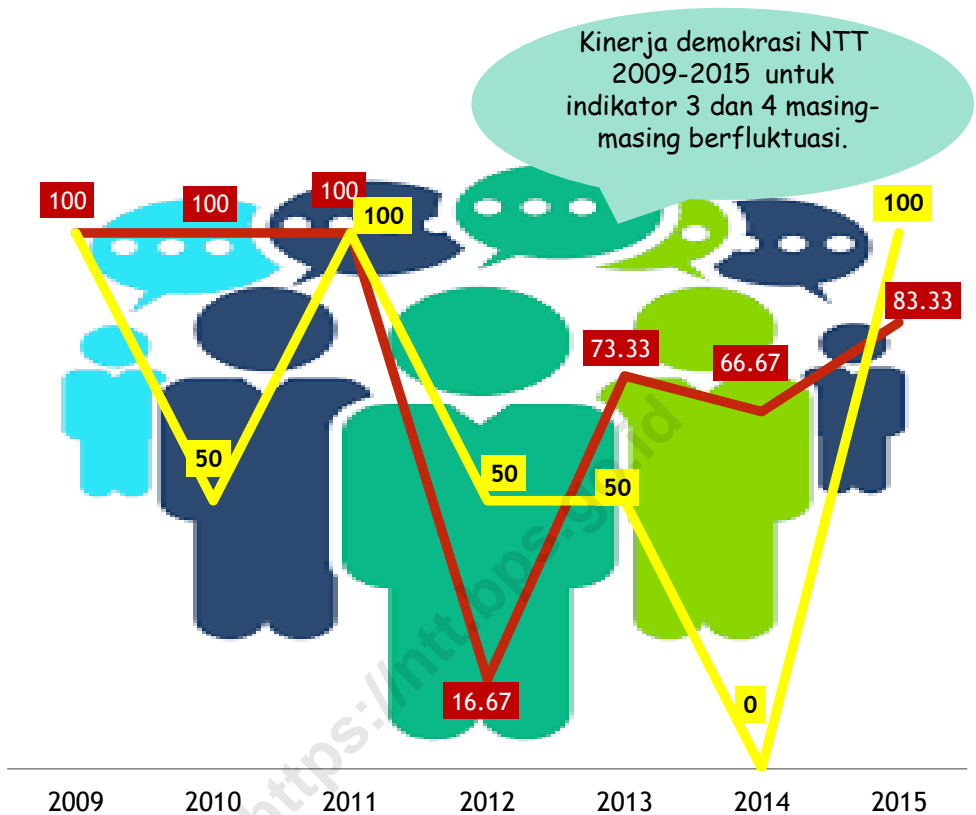
2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015

✓ Sepanjang tahun 2009-2015, nilai indikator 1 sebesar 100. Capaian kinerja demokrasi yang baik, berarti bahwa masyarakat NTT telah mampu memberi ruang kebebasan berkumpul dan berserikat di NTT.

✓ Namun, berbeda dengan indikator 2 capaian nilainya mengalami penurunan pada tahun 2010 dan tahun 2014, masing-masing sebesar 50 poin sehingga masuk kategori buruk. Hal ini menunjukkan, hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat pada tahun tersebut terjadi akibat oknum penyelenggara pemerintahan .



# Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berpendapat, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI NTT 2009 - 2015



Ind 3

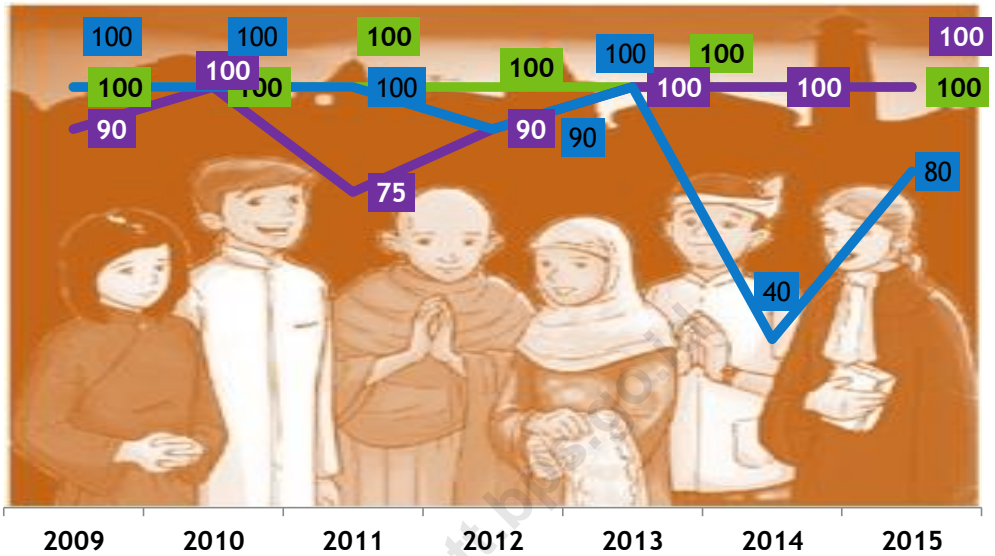
***Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat***

Ind 4

***Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat***

- ✓ Nilai capaian indikator 3 masuk kategori buruk pada tahun 2012, menurun signifikan sebesar 83,33 poin. Hal ini menunjukkan ada beberapa kejadian dimana aparat pemerintah menghambat kebebasan berpendapat di NTT
- ✓ Untuk indikator 4, penurunan nilai indeks terjadi pada tahun 2010 dan 2012-2013 masing-masing sebesar 50 poin. Penurunan paling signifikan yaitu pada tahun 2014 sebesar 100 poin. Hal ini menunjukkan beberapa kejadian dimana masyarakat menjadi penghambat dalam kebebasan berpendapat di NTT pada tahun-tahun tersebut.

## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan Berkeyakinan, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI 2009 - 2015



**Ind 5** *Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya*

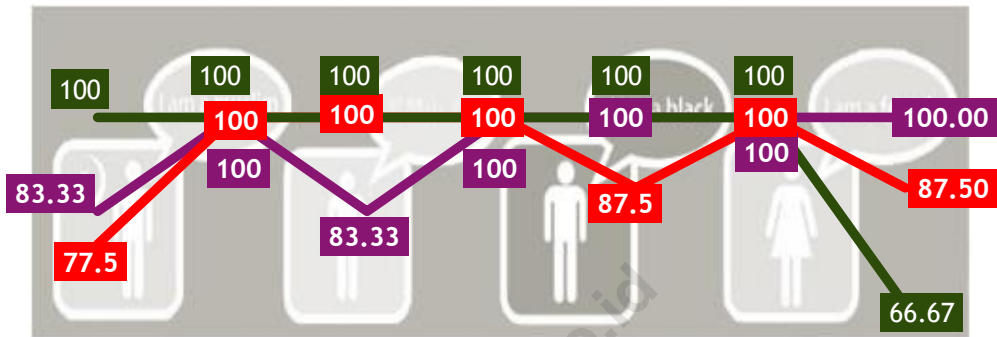
**Ind 6** *Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya*

**Ind 7** *Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama*

✓ Dalam variabel kebebasan berkeyakinan indikator 5 menunjukkan pencapaian nilai indeks demokrasi yang paling baik dalam kurun waktu 2009-2015. Berarti bahwa tidak ada aturan tertulis yang membatasi masyarakat dalam menjalankan agamanya.

✓ Dari ketiga indikator yang ada, hanya indikator 7 yang mengalami penurunan indeks yang paling tinggi sebesar 60 poin, sehingga membawa indeks masuk menjadi kategori buruk pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan ada beberapa kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dimana satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agamanya.

## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Kebebasan dari Diskriminasi, Aspek Kebebasan Sipil Hasil IDI 2009 - 2015



**Ind 8** *Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok*

**Ind 9** *Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst*

**Ind 10** *Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya*

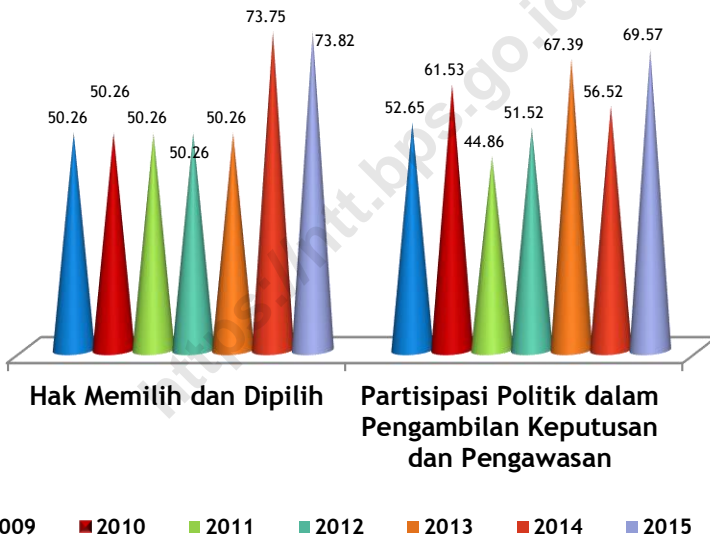
2009      2010      2011      2012      2013      2014      2015

✓ Selama tahun 2009-2015, nilai indeks indikator 10 selalu mencapai nilai indeks 100, kecuali tahun 2015, mengalami penurunan sebesar 43,33 poin. Hal ini menggambarkan, bahwa dalam 6 tahun terakhir, kinerja demokrasi selalu dalam skala yang baik dengan capaian nilai 100. Namun di tahun 2015 muncul adanya kejadian ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya sehingga berpengaruh negatif pada nilai indikator 10

✓ Indikator 8 dan indikator 9 mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tersebut. Namun nilai kedua indikator tersebut masuk dalam kategori nilai baik kecuali pada tahun 2009 indikator 9 masuk dalam kategori sedang dengan nilai sebesar 77,5



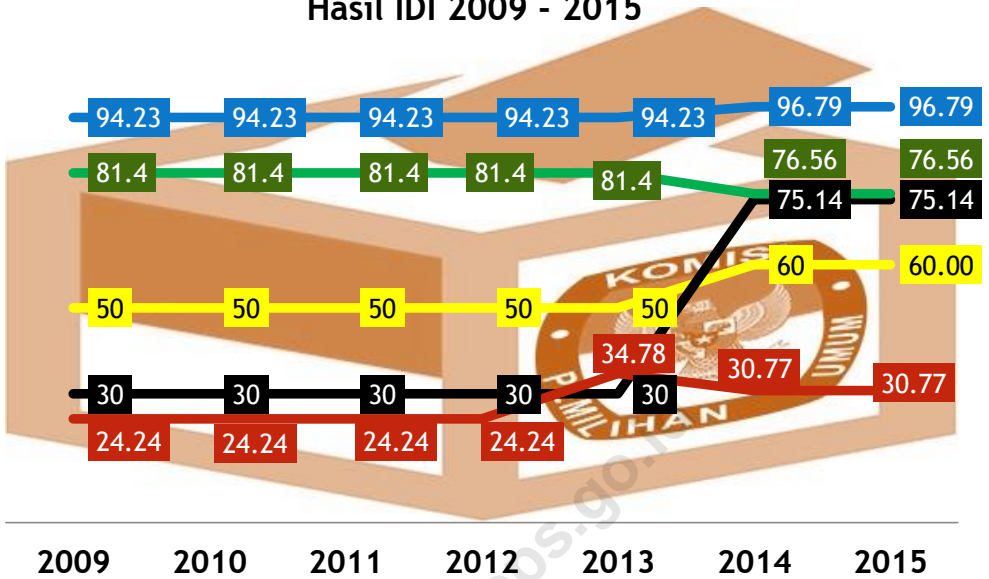
## Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik, IDI NTT 2009-2015



✓ Nilai indeks dari variabel hak memilih dan dipilih sebesar 50,26, stagnan hingga tahun 2013 karena merujuk pada pemilu legislatif tahun 2009

✓ Nilai variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2009-2015. Nilai indeks dari variabel tersebut yang paling rendah terjadi pada tahun 2011. Nilai indeksnya hanya mencapai 44,86, atau masuk kategori nilai buruk.

## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Hak Memilih dan Dipilih, Aspek Hak-Hak Politik Hasil IDI 2009 - 2015



Ind 11

*Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat*

Ind 12

Ind 13

*Kualitas daftar pemilih tetap*

Ind 14

*Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)*

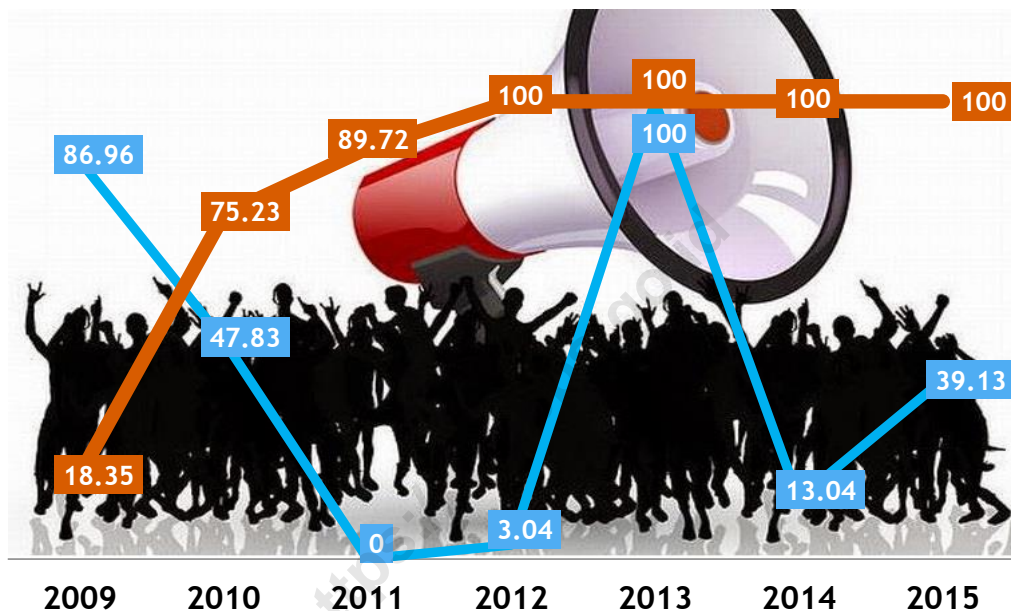
Ind 15

*Persentase perempuan di DPRD provinsi/kabupaten/kota*

✓ Angka indeks mengalami sedikit fluktuasi pada indikator 15 yakni jumlah presentase perempuan di DPRD provinsi/kabupaten dan kota, dimungkinkan karena adanya pergantian antar waktu.

✓ Jika melihat dari indikator-indikator ini, pelaksanaan demokrasi pada pemilu 2014 lebih baik dibandingkan pada pemilu legislatif 2009. Hal ini ditunjukkan dari peningkatan nilai indikator 11, 12, 13, dan 15 masing-masing sebesar 2,56 poin; 10 poin; 45,14 poin dan 6,53 poin. Penurunan nilai indeks antar waktu pemilu tersebut terjadi pada indikator 14 sebesar 4,84 poin.

## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Hak Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, Aspek Hak-Hak Politik Hasil IDI 2009 - 2015



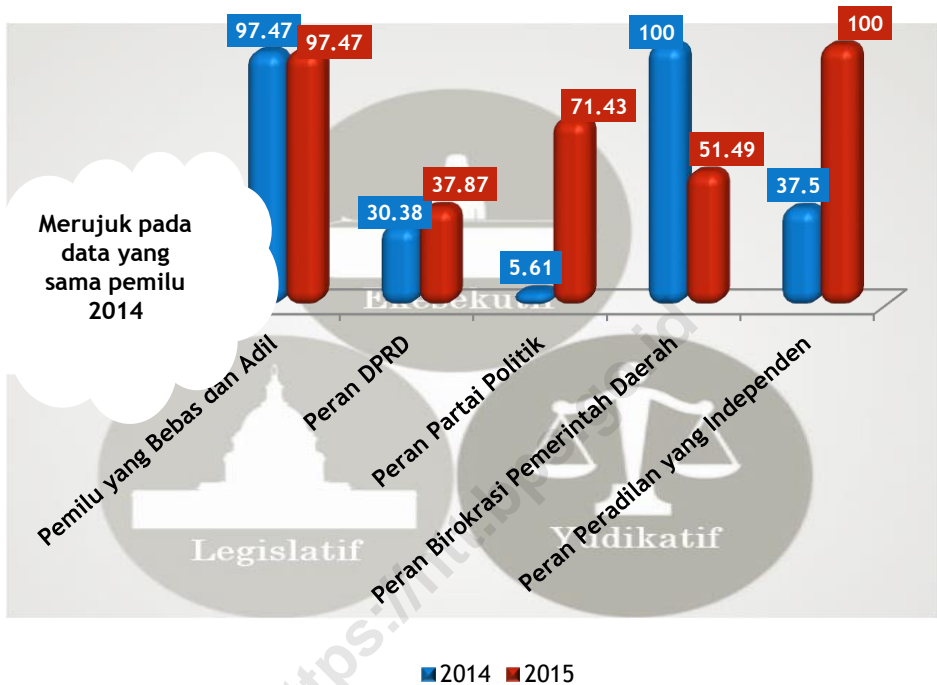
Ind 16 *Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan*

Ind 17 *Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan*

✓ Selama tahun 2009-2015, tingkat partisipasi politik masyarakat terkait pengaduan tentang berbagai hal menyangkut penyelenggaraan pemerintahan semakin tinggi dari tahun ke tahun. Nilai capaian indeks pada indikator 17 ini telah mencapai angka 100 selama 4 tahun terakhir. Namun, untuk indikator demonstrasi yang bersifat kekerasan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tersebut.

✓ Kejadian Demonstrasi bersifat kekerasan hampir selalu terjadi di setiap tahun selama 2009-2015, kecuali pada tahun 2013. Kejadian demo bersifat kekerasan paling banyak terjadi di tahun 2011 ditunjukkan dengan nilai indeks menurun 100 poin

# Perkembangan Nilai Indeks Masing-Masing Variabel dalam Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi, IDI NTT 2009-2015



- ✓ Tahun 2015, variabel-variabel dalam aspek lembaga demokrasi menunjukkan geliat positif, peningkatan nilai indeks variabel peran DPRD, peran parpol, dan peran peradilan masing-masing sebesar 7,49 poin; 65,82 poin dan 62,50 poin.
- ✓ Partisipasi lembaga demokrasi menunjukkan kinerja positif untuk lebih membuka ruang demokrasi. Akan tetapi, peran DPRD masih sangat kecil karena masih dalam kategori buruk.
- ✓ Selain itu, upaya dan dorongan perlu ditekankan pada variabel peran birokrasi pemerintah daerah yang masih dalam kategori buruk. Nilai indeks ini tidak bisa dibandingkan dengan nilai indeks tahun sebelumnya karena berbeda penggunaan indikator.

# Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2009 - 2015

Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 dan 2014 sehingga nilai yang dihasilkan tetap berdasarkan rujukan pelaksanaan pemilu.



**Ind 18** 18. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

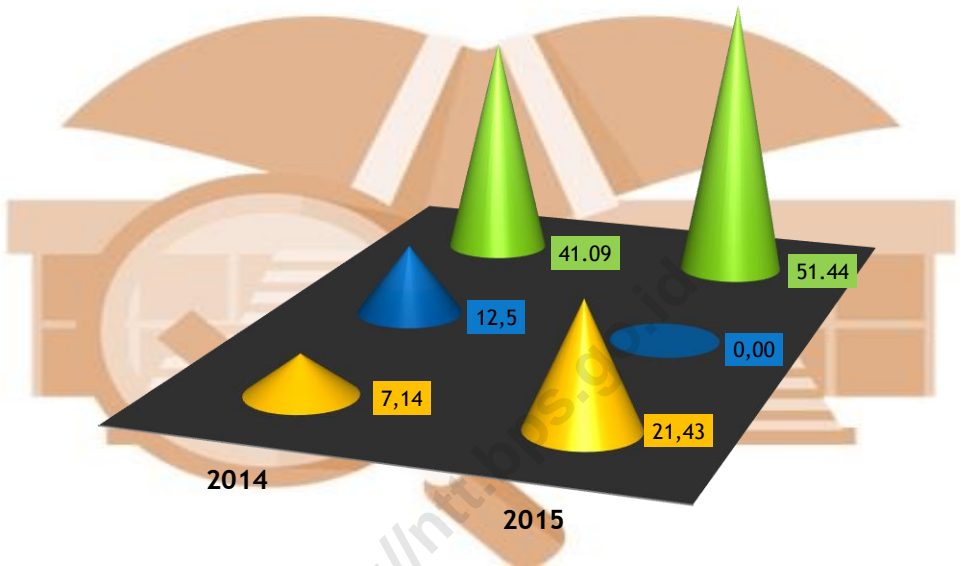
**Ind 19** 19. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara

✓ Nilai indeks indikator 18 sebesar 100. sepanjang tahun 2009-2015. Berarti bahwa pelaksanaan pemilu baik bada tahun 2009 maupun pemilu legislatif tahun 2014 dalam kacamata IDI, menunjukkan tidak adanya keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu

✓ Nilai indeks indikator 19 meningkat 21,52 poin dalam kurun waktu pemilu 2009 dan 2014. Hal ini menggambarkan peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi pemilu pada tahun 2014, dimana kejadian kecurangan dalam perhitungan suara semakin berkurang dengan membaiknya kualitas indeks



# Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran DPRD, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2014 - 2015



**Ind 20**

*Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan*

**Ind 21**

*Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan*

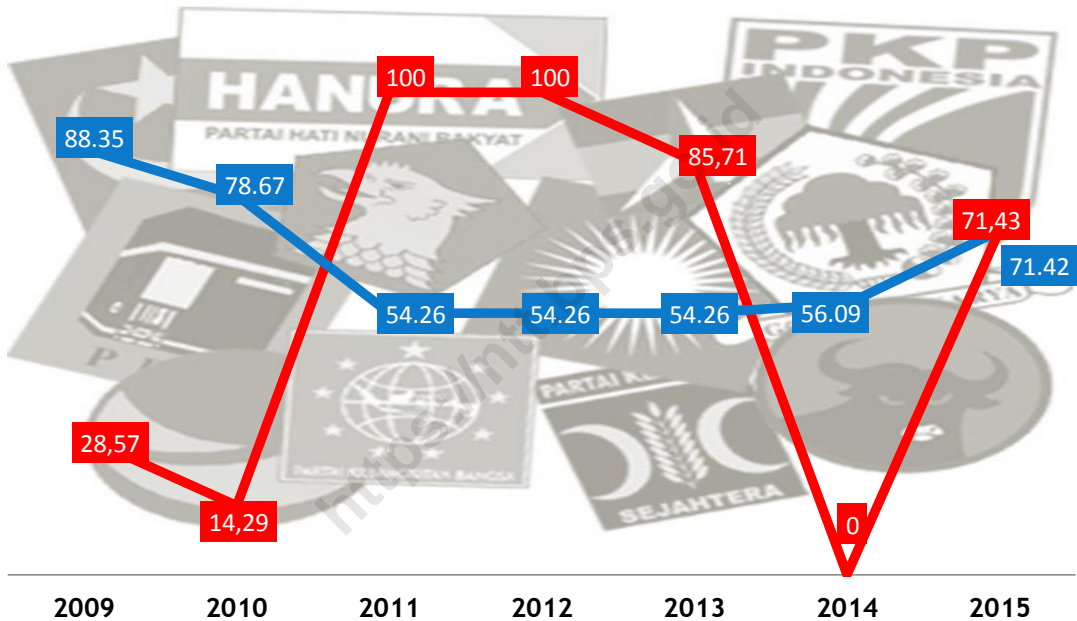
**Ind 22**

*Rekomendasi DPRD kepada eksekutif*

✓ Selama tahun 2014-2015, nilai-nilai indikator dalam peran DPRD masih dalam kategori buruk. DPRD perlu berupaya membuka ruang untuk meningkatkan perannya dalam berdemokrasi.

✓ Tahun 2015 nilai indeks indikator 21 bernilai 0, berarti bahwa tidak ada perda yang dihasilkan dari hak inisiatif DPRD

## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran Parpol, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2009 - 2015



**Ind 23**

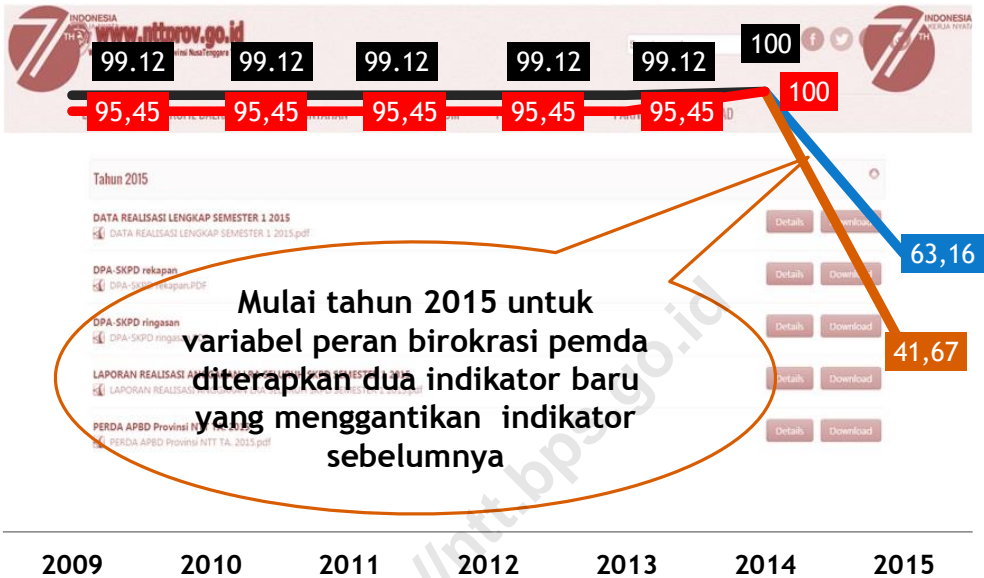
***Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu***

**Ind 24**

***Persentase perempuan pengurus partai politik***

- ✓ Peran partai politik dalam berdemokrasi cukup berfluktuatif.
- ✓ Hingga tahun 2015, capaian kinerja dilihat dari nilai indeks indikator 23 dan indikator 24 menunjukkan kinerja dalam kategori sedang.
- ✓ Indikator 23 pernah mencapai nilai indeks kategori baik dalam kurun waktu 2011-2013

# Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran Birokrasi Pemda, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2009 - 2015



**Ind 25** 25. Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon /parpol tertentu dalam pemilu legislatif diganti menjadi **Kebijakan Pejabat Pemerintah yang dinyatakan bersalah**

**Ind 26** 26. Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif diganti menjadi **Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah**

✓ Selama kurun waktu 2009-2014 kinerja indikator 25 dan 26 selalu dalam kategori baik.

✓ Penggantian indikator tersebut tidak memungkinkan untuk diperbandingkan. Namun demikian, nilai yang dicapai oleh indikator 25 masih dalam kategori sedang, sedangkan indikator 26 masuk dalam kategori buruk.

## Perkembangan Skor Indikator pada Variabel Peran Peradilan yang Independen, Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi Hasil IDI 2009 - 2015



- ✓ Selama periode 2009-2015, indikator 27 mengalami penurunan nilai indeks pada tahun 2010, 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 25 poin
- ✓ Begitupun dengan indikator 28 mengalami penurunan nilai indeks sebesar 100 poin di tahun 2013 dan 2014.
- ✓ variabel peran peradilan yang independen mengalami penurunan. Pada tahun 2015 ditemukan keputusan hakim yang kontroversial dan adanya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa dan polisi sehingga nilai indeks mengalami penurunan pada indikator tersebut.

# LAMPIRAN

Tabel 1. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi , Tahun 2009

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	66,29	64,42	70,39	62,13
Sumut	60,20	84,16	41,26	60,14
Sumbar	60,29	63,06	53,57	67,48
Riau	75,85	93,14	65,40	70,68
Jambi	71,00	95,86	50,41	72,43
Sumsel	72,52	95,42	56,07	69,83
Bengkulu	64,76	94,26	54,03	44,70
Lampung	67,47	90,57	51,81	63,27
Babel	67,01	96,51	48,29	59,65
Kep. Riau	73,61	96,22	59,47	67,62
DKI Jakarta	73,91	91,65	52,20	86,09
Jawa Barat	71,07	85,84	68,48	56,61
Jateng	66,45	86,48	51,85	64,43
DIY	67,55	92,15	52,52	60,48
Jawa Timur	62,49	83,30	50,96	54,64
Banten	67,98	95,46	49,47	62,83
Bali	70,35	93,97	49,82	73,24
NTB	58,12	68,05	47,50	62,48
<b>NTT</b>	<b>71,64</b>	<b>95,55</b>	<b>51,46</b>	<b>73,63</b>
Kalbar	72,38	98,29	53,46	69,85
Kalteng	77,63	98,45	60,50	78,69
Kalsel	66,63	68,24	62,63	70,95
Kaltim	72,31	98,22	54,78	67,57
Sulut	70,94	92,23	58,50	63,91
Sulteng	66,02	98,51	45,90	57,14
Sulsel	61,48	82,94	42,36	64,88
Sultra	64,29	94,66	43,97	58,37
Gorontalo	73,50	96,05	56,39	73,32
Sulbar	67,99	93,82	53,09	59,15
Maluku	69,07	92,77	52,05	66,30
Maluku Barat	67,21	93,61	46,30	67,23
Papua Barat	63,06	93,14	37,09	66,48
Papua	63,80	92,83	43,84	58,97
<b>INDONESIA</b>	<b>67,30</b>	<b>86,97</b>	<b>54,60</b>	<b>62,72</b>

# LAMPIRAN

Tabel 2. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi Tahun 2010

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	65,36	69,98	62,63	63,87
Sumut	63,45	76,64	57,42	56,45
Sumbar	63,04	58,34	63,90	67,59
Riau	71,45	91,02	47,19	85,39
Jambi	65,88	85,15	48,14	69,81
Sumsel	73,65	100,00	55,17	69,85
Bengkulu	70,78	94,40	64,35	51,29
Lampung	67,80	94,39	53,90	56,44
Babel	65,94	85,95	48,44	68,57
Kep, Riau	62,89	87,04	39,80	69,20
DKI Jakarta	77,44	92,46	56,19	92,30
Jawa Barat	59,41	74,41	46,74	60,67
Jawa Tengah	63,42	84,83	46,29	63,70
DIY	74,33	91,24	55,96	82,25
Jawa Timur	55,12	78,48	42,06	46,47
Banten	60,60	83,17	38,70	66,99
Bali	72,44	94,10	51,52	78,43
NTB	58,13	67,22	46,48	65,19
<b>NTT</b>	<b>72,05</b>	<b>95,55</b>	<b>55,89</b>	<b>68,15</b>
Kalbar	69,32	99,17	45,19	70,11
Kalteng	71,10	94,51	56,05	65,57
Kalsel	70,94	67,74	72,66	72,25
Kaltim	73,04	97,79	53,89	72,34
Sulut	65,94	92,98	44,90	65,34
Sulteng	66,63	92,19	51,82	58,01
Sulsel	56,67	78,19	32,40	68,17
Sultra	54,79	83,71	30,46	57,06
Gorontalo	64,97	82,55	51,72	63,90
Sulbar	67,57	94,48	47,22	66,06
Maluku	69,51	96,22	48,12	69,89
Maluku Barat	59,92	92,59	30,82	65,06
Papua Barat	67,75	99,84	44,24	64,73
Papua	60,26	90,72	31,76	67,22
<b>INDONESIA</b>	<b>63,17</b>	<b>82,53</b>	<b>47,87</b>	<b>63,11</b>

# LAMPIRAN

Tabel 3. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2011

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	55,54	58,65	47,90	63,77
Sumut	66,15	79,23	59,47	60,31
Sumbar	65,02	60,57	59,21	79,83
Riau	70,65	83,12	52,90	83,18
Jambi	70,46	91,62	46,27	82,27
Sumsel	67,92	84,05	49,41	77,05
Bengkulu	71,36	94,10	59,47	61,63
Lampung	74,08	93,14	61,15	70,64
Babel	67,13	88,27	47,11	72,33
Kep. Riau	70,78	87,15	56,00	73,66
DKI Jakarta	77,81	89,94	58,32	93,50
Jawa Barat	66,18	78,92	46,42	81,55
Jawa Tengah	65,59	84,05	46,29	73,04
DIY	71,67	87,22	52,35	82,81
Jawa Timur	55,98	71,58	40,32	61,23
Banten	67,37	80,41	44,57	87,18
Bali	74,20	95,44	50,08	85,79
NTB	54,49	55,45	49,60	61,06
<b>NTT</b>	<b>72,34</b>	<b>96,79</b>	<b>47,56</b>	<b>80,97</b>
Kalbar	74,86	97,15	49,34	87,38
Kalteng	76,28	92,56	54,73	90,04
Kalsel	66,47	56,33	64,25	82,76
Kaltim	66,37	91,84	45,12	68,10
Sulut	71,19	98,44	52,86	66,03
Sulteng	64,00	92,23	37,01	71,36
Sulsel	65,31	80,97	39,33	86,87
Sultra	57,56	85,81	29,18	67,11
Gorontalo	62,77	81,80	44,36	68,08
Sulbar	66,36	94,80	42,65	68,26
Maluku	68,38	90,70	46,14	75,61
Maluku Barat	59,17	90,04	32,61	62,56
Papua Barat	61,78	93,59	43,99	50,03
Papua	59,05	87,73	29,43	70,04
<b>INDONESIA</b>	<b>65,48</b>	<b>80,79</b>	<b>47,54</b>	<b>74,72</b>



# LAMPIRAN

Tabel 4. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi , Tahun 2012

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga- lembaga Demokrasi
NAD	54,02	60,16	47,16	57,21
Sumut	58,51	73,85	49,82	53,01
Sumbar	60,82	57,10	50,85	81,32
Riau	67,00	80,21	47,16	81,89
Jambi	68,81	86,23	46,60	82,18
Sumsel	73,17	93,26	55,21	76,42
Bengkulu	61,70	77,76	48,93	61,79
Lampung	72,26	94,14	50,60	79,16
Babel	69,37	83,09	51,21	80,97
Kep. Riau	65,61	82,68	49,98	68,95
DKI Jakarta	77,72	88,11	62,52	88,81
Jawa Barat	57,05	65,93	46,58	62,51
Jawa Tengah	63,79	75,03	46,29	77,46
DIY	72,96	87,39	55,52	82,52
Jawa Timur	54,99	80,97	36,17	52,22
Banten	65,29	79,20	51,03	70,42
Bali	71,75	94,18	45,00	86,01
NTB	57,97	58,31	49,60	70,85
<b>NTT</b>	<b>72,67</b>	<b>91,06</b>	<b>50,89</b>	<b>84,15</b>
Kalbar	65,38	92,37	37,18	76,23
Kalteng	65,78	68,44	51,05	85,82
Kalsel	61,13	49,51	52,59	89,33
Kaltim	71,23	97,16	51,69	69,68
Sulut	76,50	95,64	58,65	80,77
Sulteng	64,97	93,43	37,65	72,55
Sulsel	68,55	87,07	43,74	84,66
Sultra	57,26	91,39	29,50	58,44
Gorontalo	59,37	73,25	50,76	55,59
Sulbar	63,65	88,67	35,92	76,22
Maluku	59,68	76,05	45,08	62,27
Maluku Barat	66,83	88,15	50,13	66,55
Papua Barat	65,70	94,42	45,74	61,27
Papua	60,71	91,11	32,99	66,50
<b>INDONESIA</b>	<b>62,63</b>	<b>77,94</b>	<b>46,33</b>	<b>69,28</b>



# LAMPIRAN

Tabel 5. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2013

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	63,56	71,78	48,59	76,97
Sumut	58,80	73,65	49,50	54,90
Sumbar	54,11	54,88	38,97	77,17
Riau	68,37	77,71	52,19	82,32
Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34
Sumsel	67,12	91,45	50,32	63,22
Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28
Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58
Babel	68,79	85,16	50,60	77,09
Kep. Riau	66,50	80,08	49,63	76,21
DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69
Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05
Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89
DIY	72,36	90,78	50,65	83,69
Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10
Banten	69,79	81,39	51,03	85,00
Bali	72,22	92,55	52,87	77,38
NTB	57,22	59,68	49,60	66,24
<b>NTT</b>	<b>73,29</b>	<b>95,59</b>	<b>58,83</b>	<b>68,23</b>
Kalbar	67,52	97,54	49,36	58,61
Kalteng	64,15	81,89	50,69	63,21
Kalsel	63,71	58,03	56,35	82,54
Kaltim	68,13	92,14	55,36	58,20
Sulut	73,11	92,44	62,55	65,56
Sulteng	64,50	90,03	36,78	76,44
Sulsel	65,20	81,30	50,62	68,10
Sultra	52,61	84,32	28,95	50,32
Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22
Sulbar	64,02	88,51	44,05	64,94
Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95
Maluku Barat	64,06	83,67	48,94	63,40
Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26
Papua	60,92	90,21	31,37	71,01
<b>INDONESIA</b>	<b>63,72</b>	<b>79,00</b>	<b>46,25</b>	<b>72,14</b>

# LAMPIRAN

Tabel 6. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi Tahun 2014

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	72,29	69,76	63,94	88,73
Sumut	68,02	79,86	61,97	62,75
Sumbar	63,99	47,21	61,82	88,56
Riau	68,40	74,35	59,74	74,69
Jambi	71,15	78,23	54,01	89,48
Sumsel	74,82	86,09	63,57	78,53
Bengkulu	71,70	79,49	63,98	74,16
Lampung	71,62	72,06	63,69	83,66
Babel	75,32	89,80	56,48	87,01
Kep, Riau	68,39	82,47	58,35	66,61
DKI Jakarta	84,70	91,72	73,94	92,97
Jawa Barat	71,52	83,95	65,22	65,89
Jawa Tengah	77,44	87,87	67,08	80,77
DIY	82,71	86,25	76,07	88,82
Jawa Timur	70,36	81,62	56,29	78,54
Banten	75,50	81,10	63,68	87,22
Bali	76,13	92,16	61,27	79,56
NTB	62,62	58,73	62,08	68,38
<b>NTT</b>	<b>68,81</b>	<b>85,92</b>	<b>65,13</b>	<b>53,12</b>
Kalbar	80,58	98,44	63,12	85,84
Kalteng	79,00	92,93	66,42	81,48
Kalsel	70,84	58,43	76,45	77,53
Kaltim	77,77	93,28	70,42	69,94
Sulut	83,94	93,56	80,89	76,68
Sulteng	74,36	86,56	59,01	83,42
Sulsel	75,30	86,27	73,99	63,58
Sultra	70,13	90,89	53,20	70,92
Gorontalo	73,82	82,19	63,67	79,41
Sulbar	76,69	90,22	63,64	80,39
Maluku	72,72	90,85	60,03	70,09
Maluku Barat	67,90	76,90	60,61	68,16
Papua Barat	65,65	97,93	39,29	66,93
Papua	62,15	85,69	42,51	63,75
<b>INDONESIA</b>	<b>73,04</b>	<b>82,62</b>	<b>63,72</b>	<b>75,81</b>

# LAMPIRAN

Tabel 7. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2015

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga- lembaga Demokrasi
NAD	67,78	74,81	63,98	64,97
Sumut	69,01	82,02	62,17	63,52
Sumbar	67,46	52,99	69,77	82,01
Riau	65,83	66,46	66,61	63,80
Jambi	70,68	75,89	62,12	77,72
Sumsel	79,81	96,06	78,79	61,00
Bengkulu	73,60	78,50	68,45	75,61
Lampung	65,95	71,99	63,19	62,74
Kep. Babel	72,31	81,25	66,95	69,60
Kep. Riau	70,26	80,16	65,01	66,13
DKI Jakarta	85,32	89,64	83,19	83,26
Jawa Barat	73,04	79,10	81,89	51,37
Jawa Tengah	69,75	79,44	67,28	61,48
DIY	83,19	90,41	77,98	82,38
Jawa Timur	76,90	85,26	67,44	81,39
Banten	68,46	74,28	63,72	68,66
Bali	79,83	94,42	77,42	65,31
NTB	65,08	51,59	61,11	88,36
<b>NTT</b>	<b>78,47</b>	<b>93,19</b>	<b>71,69</b>	<b>70,73</b>
Kalbar	76,40	96,81	65,57	67,95
Kalteng	73,46	85,07	68,31	67,05
Kalsel	74,76	54,15	85,77	83,17
Kaltim	81,24	93,07	82,74	63,99
Kalut	80,16	98,10	83,65	52,05
Sulut	79,40	86,71	77,92	72,53
Sulteng	76,67	94,60	68,85	66,53
Sulsel	67,90	69,38	64,25	71,84
Sultra	69,44	91,14	56,95	61,99
Gorontalo	76,77	81,35	69,97	81,81
Sulbar	68,25	81,88	61,16	62,37
Maluku	65,90	76,04	63,20	57,43
Maluku Barat	61,52	73,53	61,00	47,25
Papua Barat	59,97	92,33	39,48	51,81
Papua	57,55	82,72	41,81	50,87
<b>INDONESIA</b>	<b>72,82</b>	<b>80,30</b>	<b>70,63</b>	<b>66,87</b>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang – 85111**

**Telp. (0380) 826289, 821755; Fax. (0380) 833124**

**Website: [ntt.bps.go.id](http://ntt.bps.go.id); Email: [bps5300@bps.go.id](mailto:bps5300@bps.go.id)**